

Bukan Sekadar Utara - Selatan: Kajian Kritis Terhadap Binaritas dalam Wacana *Global North-South*

Andrew Elnathan¹⁾, Aswin Ariyanto Azis²⁾

Universitas Brawijaya¹⁾²⁾

Correspondence author: andrewelnathan27@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

North-South Studies, Post-Colonialism, Deconstruction

How to cite:

Elnathan, Andrew. 2026. Bukan Sekadar Utara - Selatan: Kajian Kritis Terhadap Binaritas dalam Wacana Global North-South. *Emik*, 9(1), 234-252.

Article info:

Diterima 2026-01-11
Disetujui 2026-05-21
Dipublikasi 2026-05-29

ABSTRACT

The study of international development politics initially had a status quo which was studied by categorizing countries between the North ("Global North") and the South ("Global South"). Therefore, previous studies have focused more on using the concepts of Global North and Global South as a framework to describe global development inequality.

This article critiques the hierarchical ontology and epistemology prevalent in Global North and Global South studies in international development, which have been widely adopted but fail to capture the complexity of contemporary global relations adequately. This research employs a qualitative, literature-based methodology, drawing on critical scholarship in postcolonialism, development studies, and international relations. Through interpretive analysis and literature review, the study deconstructs dominant narratives surrounding the North-South divide and evaluates their theoretical and empirical limitations.

The findings reveal several key contributions to socio-political North-South studies. First, the article demonstrates that the binary classification fails to account for internal heterogeneity and dynamic transformations within states, as evidenced by cases such as Cina, which challenges conventional developmental hierarchies. Second, the study introduces a deconstructive framework inspired by Derridean thought, showing that the North-South dichotomy is not a neutral analytical tool, but a politically constructed discourse embedded with epistemic bias. Third, the incorporation of postcolonial perspectives, such as the "upside-down world map" and bottom-up approaches, offers a novel way to reconceptualize global relations beyond rigid geographical determinism. These findings advance the field by proposing that development should be understood as a multidimensional and context-specific process shaped by historical, sociological, and transnational factors, rather than fixed binary categories. Ultimately, this article contributes to the growing urgencies for a more reflexive, pluralistic, and decolonized framework in global development and international relations scholarship.

1. Pendahuluan

Kajian terhadap politik pembangunan internasional pada mulanya memiliki status quo yang dikaji oleh kategorisasi negara antara Utara ("*Global North*") dan Selatan ("*Global*

South”). Negara-negara Utara memiliki karakteristik pembangunan yang menekankan kepemilikan dan produksi teknologi tinggi yang mempercepat pertumbuhan industri, membangun infrastruktur dan memiliki sistem kesejahteraan yang efisien dan menyeluruh, dalam aspek politik, negara-negara Utara cenderung mempunyai sistem politik yang demokratis, memiliki sistem *checks & balances* dalam setiap aspek kepemimpinan dan pemerintahan domestik. Dalam aspek ekonomi, negara-negara Utara kerap diasosiasikan dengan pendapatan per kapita yang besar tanpa adanya kesenjangan pendapatan yang tinggi, pendapatan ekonomi yang sangat pesat ini didapatkan dari keunggulan komparatif terhadap komoditas dan faktor produksi yang dimiliki dari gabungan aspek teknologi dan kepemilikan sumber daya alam maupun manusia yang memadai (The Brand Report 1980:1). Sementara itu, negara-negara Selatan menurut Adem (2021: 33) memiliki ciri-ciri sebagai negara yang sedang atau kurang berkembang dalam aspek ekonomi dan politik, dalam aspek ekonomi, negara-negara Selatan diasosiasikan dengan memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekspor komoditas dari negara Utara, negara Selatan memiliki status quo dimana mereka memiliki berbagai komoditas, namun komoditas dan SDA yang dimiliki belum dapat mereka olah untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi, dan sumber daya yang bentuknya masih “mentah” harus diolah oleh teknologi yang dimiliki negara-negara Utara dahulu.

Pendapatan per kapita negara Selatan juga cenderung lebih rendah dan digabungkan dengan proses industrialisasi yang belum matang. Dalam aspek politik, negara-negara Selatan kerap diasosiasikan sebagai negara dengan sistem politik yang tidak stabil karena belum demokratis, masih menggunakan sistem otoriter, tidak ada *checks and balances* antar berbagai fungsionaris pemerintahan domestik, dan memiliki pemerintah yang ekstraktif terhadap masyarakat yang ada di dalam negaranya, upaya ekstraktif ini diwujudkan dengan cara melakukan korupsi melalui tuntutan pajak yang besar tanpa memberikan kontribusi kembali terhadap masyarakat yang membuat kemajuan pengetahuan mereka terus stagnan (Adem 2021:21). Kategorisasi dan status quo yang membandingkan negara *Global North* dengan *Global South* ini muncul setelah Perang Dunia II yang dipopulerkan oleh The Brand Report pada tahun 1980. Kategorisasi ini pada masa tersebut kerap digunakan karena belum ada teori yang dapat mengkaji perbandingan negara maju dengan negara yang tidak berkembang, lalu ditambahkan juga peningkatan relevansi kajian Utara-Selatan karena kategorisasinya yang dapat dibuktikan dengan jelas setelah perang dingin selesai terjadi yang memberikan premis kalau negara yang terletak di Utara dan diatas garis tengah yang dibuat oleh Brand Report lebih maju dibandingkan negara Selatan (The Brand Report 1980: 65).

Setelah hadirnya teori Negara Utara-Selatan untuk studi pembangunan politik internasional dan ilmu Hubungan Internasional, terhadap pembangunan negara lalu dikembangkan lagi lebih dalam oleh berbagai pustakawan. Contohnya adalah adanya Immanuel Wallerstein (yang mengemukakan *World System Theory* yang beranggapan bahwa pembangunan dan kategorisasi keunggulan ekonomi dan politik suatu negara dalam sistem internasional dapat dikategorisasikan dengan negara *core*-periferi-semiperiferi. Negara *core* adalah negara dengan sistem ekonomi-politik paling maju yang memiliki faktor produksi dan teknologi paling kuat yang mengolah komoditas dari negara periferi dan semi-periferi. Negara semi-periferi adalah negara yang memiliki teknologi dan faktor produksi dengan kemampuan moderat, tetapi bergantung terhadap hasil komoditas yang telah diolah dari teknologi negara *core*. Terakhir negara periferi adalah negara yang paling ditindas karena kurangnya teknologi dan faktor produksi yang mereka miliki. Selain itu, mereka harus menjual komoditas mereka dengan harga yang sangat murah terhadap negara *core* dan atau semi-periferi, tetapi mereka harus membeli hasil olahan komoditas tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal setelah diolah teknologi negara maju dan semi-periferi (Wallerstein 2011:121). Selain itu, perkembangan teori untuk kategorisasi negara juga dikembangkan oleh Arturo Escobar

yang mengemukakan teori *Encountering Development*. Teori ini menegaskan bahwa pembangunan adalah wacana teoritis yang dibuat oleh negara-negara Utara pasca perang dingin agar negara-negara Selatan terus terbelakang secara epistemologi dan struktural (dalam Carnegie 2022:68). Perkembangan epistemologi dan studi pembangunan yang lahir dari negara-negara Utara, kerap terjadi kategorisasi negara Utara-Selatan yang terlalu menggeneralisir studi pembangunan, hal ini membuat studi pembangunan terhadap suatu negara sifatnya oposisi biner tanpa adanya kajian yang lebih dalam kepada suatu negara (Carnegie, 2022: 68).

Kajian terhadap pembangunan internasional tidak dapat dikaji melalui klasifikasi apakah negara itu masuk kategori Utara atau Selatan saja, melainkan diperlukan kajian yang lebih kritis dan mendalam terhadap suatu negara. Argumen ini selaras dengan *literature review* dari premis-premis Haug dkk. (2021:21) berjudul "The *Global South* in the Study of World Politics: Examining a Meta Category." Premis Haug dkk. adalah pengkajian politik pembangunan dan hubungan internasional secara biner antara *Global North* atau *Global South* terlalu sederhana dan tidak mengkaji aspek-aspek lain dalam negara. Klasifikasi biner ini membuat kajian pembangunan internasional gagal menjelaskan dinamika sistemik kekuasaan global yang berubah dan mengabaikan kekuatan dari negara-negara Selatan yang dapat mengubah dinamika tersebut. Aspek-aspek seperti sejarah dan pengaruh kolonialisme di negara Selatan, bagaimana kapitalisme memengaruhi negara Selatan, dan aspek geopolitik yang perlu dipertimbangkan bukan hanya dari garis yang diangkat oleh garis imajiner Brandt. Argumen dari Haug diperkuat dengan bukti bahwa kini, negara Selatan memainkan peran besar dalam tatanan pembangunan global, bahkan dapat menyaingi kekuatan dan pengaruh dari negara Utara, dan contoh ini dibuktikan oleh Haug melalui negara Cina.

Kajian Utara-Selatan tidak dapat hanya dengan mengkaji ketimpangan global dari aspek geografis, melainkan juga melalui taktik alternatif untuk memecahkan kajian yang biner ini dengan pendekatan urban-pascakolonial dengan cara: (1) berpikir dari perspektif negara Selatan untuk memahami dampak dari kebijakan dan status quo dari Utara terhadap negara-negara Selatan, (2) membandingkan perbedaan sistem sosial antara negara Utara dan Selatan, (3) menelusuri efek transnasionalisme terhadap negara-negara. Ketiganya memberikan dekonstruksi terhadap wacana *Global North* dan *Global South* yang hierarkis dan menawarkan jawaban bahwa teori pembangunan internasional dapat dijelaskan melalui pendekatan yang dikaji secara *bottom-up* dan tidak mengikuti status quo saja (Gillespie & Mitlin 2023).

Oleh karenanya, penulis hendak memberikan kajian kritis terhadap oposisi biner dari studi Utara-Selatan dalam studi politik pembangunan internasional, sehingga pembangunan tidak dilihat dan dikategorisasi secara umum melalui Utara-Selatan saja, melainkan kajian pembangunan internasional yang lepas dari belenggu geografis dan kajian yang lebih mendalam tentang klasifikasi pembangunan negara melalui aspek sosiologis, dan pengaruh global yang dapat diberikan oleh negara Selatan.

Penulis menemukan definisi *Global South* dari akademisi terkemuka subjek tersebut yang dimulai dari the Brand Report. Lembaga riset Brand Report (1980:65) melaporkan jikalau peta dunia digambarkan garis ditengah-tengahnya, maka akan terlihat negara di posisi Utara dan Selatan, negara di posisi Selatan ini didefinisikan lebih inferior karena lemahnya ekonomi, kecenderungan sistem politik yang tidak stabil, dan bergantung terhadap sumber daya dari negara Utara (Haug dkk. 2021). Seiring waktu, definisi *Global South* terus berkembang. Connell (2007:9) menyatakan bahwa *Global South* adalah kajian yang dapat mengungkapkan bahwa pengetahuan sosial dari Utara menjadi hegemoni dan acuan pengetahuan global, sementara pengetahuan Selatan dapat dianggap "lokal" dan terpinggirkan oleh dominasi ilmu yang berhasil diterapkan dari Utara. Mignolo (2011) menggunakan istilah *Global South* yang merujuk pada upaya dekolonialisme untuk melawan pemikiran kolonialisme dan universalisme pengetahuan

dari negara Utara. Santos (2018:38) memberikan definisi bahwa negara *Global South* tidak terikat dari letak geografis saja, melainkan merujuk kepada penderitaan sistematis yang disebabkan oleh kolonialisme dan kapitalisme global yang menggeser epistemologi pengetahuan dari negara-negara *Global South*.

Kajian mengenai studi *Global North* dan *Global South* dalam studi pembangunan dan politik global semakin banyak mendapatkan kritik dari berbagai literatur. Haug dkk. (2021), misalnya, menyoroti bahwa istilah *Global North* dan *Global South* kini telah menjadi tidak relevan secara konseptual karena hanya menggambarkan marginalisasi sosial-ekonomi secara geografis tanpa memperhitungkan kompleksitas terhadap realitas dan isu kontemporer. Hal ini diperkuat oleh temuan Ito (2024:8) yang menunjukkan bahwa kategorisasi Utara dan Selatan gagal menangkap realitas sosial dan dinamika masyarakat dalam konteks kontemporer seperti studi masa kanak-kanak. Sementara itu, studi Giellispe & Mitlin (2023:27) mengindikasikan bahwa gerakan transnasional yang lahir dari masyarakat akar rumput, khususnya di Asia Timur, tidak dapat dipahami melalui lensa konvensional Utara-Selatan karena dinamika sosialnya jauh lebih kompleks dan lintas batas geopolitik.

Selanjutnya, dalam aspek yang lebih luas, Odeh (2010:11) mengidentifikasi bahwa kajian *Global North* dan *Global South* tidak dapat menjelaskan kompleksitas struktur ekonomi-politik di balik klasifikasi tersebut. Oleh karenanya, pendekatan dan teori alternatif juga mulai diangkat dalam literatur seperti kajian dari lembaga riset Carnegie (2022:68) yang menawarkan pendekatan pascakolonial sebagai jalan keluar dari status quo teoritis dalam studi ini. Hal ini berkaitan erat dengan hasil *literature review* Triuzi (2025:3), yang menekankan pentingnya strategi anti-kolonialisme dan bagaimana negara-negara "Selatan" berpotensi membalik dominasi narasi global.

Pemikiran pascakolonial seperti yang dijabarkan dalam *Post-Colonialism and the Political Imagination* dan *Postcolonialism and Development* oleh Spencer (1997:12) menguraikan bagaimana warisan kolonial turut memengaruhi pembentukan identitas politik serta proses pembangunan negara-negara bekas jajahan. Kontribusi penting juga datang dari literatur yang meninjau peran Cina dalam membongkar narasi *Global North-South* (Haug 2021:7), yang menyatakan bahwa model pembangunan dan sistem ekonomi-politik Cina mampu melampaui klasifikasi tradisional dan bahkan menjadi alternatif paradigma pembangunan global. Studi kasus dari Cina ini menawarkan bukti bahwa negara Selatan juga dapat mengalahkan pembangunan negara yang secara geografis terletak di Utara.

Studi-studi sebelumnya lebih menitikberatkan pada penggunaan konsep *Global North* dan *Global South* sebagai kerangka untuk menggambarkan ketimpangan pembangunan global seperti studi pascakolonial dari Raewyn Connell dan Boaventura de Sousa Santos yang menyoroti dominasi epistemik *Global North* serta pentingnya menghadirkan pengetahuan alternatif dari *Global South*. Sementara itu, dalam kajian pembangunan kontemporer, artikel ini juga merujuk pada studi Haug dkk., Patrick dan Huggins, serta Gillespie dan Mitlin yang mengkritisi generalisasi kategori *Global South* dan menekankan dinamika pembangunan yang lebih kontekstual dan beragam artikel ini berfokus pada kritik terhadap keterbatasan dan problematika dari penggunaan dikotomi Utara-Selatan. Banyak penelitian terdahulu cenderung menerima pembagian Utara-Selatan sebagai sesuatu yang sudah mapan, tanpa mempertanyakan bagaimana konsep tersebut terbentuk dan apakah masih relevan dalam menjelaskan realitas global saat ini yang berpotensi mempertahankan cara pandang yang hierarkis dalam melihat hubungan antar negara. Ini akan mengkritisi pemaknaan tersebut.

Kajian-kajian terkini dalam studi pembangunan internasional secara konsisten mengarah pada pengakuan bahwa diskursus *Global North* dan *Global South* memang bukan merupakan wacana yang netral, melainkan konstruksi epistemik yang sarat relasi kuasa, sebagaimana ditegaskan oleh Turner (2024:1) yang mengidentifikasi bahwa

perspektif *western-centric* dalam riset Utara-Selatan terus mereproduksi hierarki pengetahuan yang memarjinalkan epistemologi dari negara-negara Selatan, serta dikonfirmasi oleh Horner (2020:1) yang menyatakan bahwa kerangka pembangunan internasional berbasis dikotomi Utara-Selatan semakin tidak relevan untuk menjelaskan realitas abad ke-21 yang ditandai oleh kapitalisme global yang saling terhubung secara struktural. Arah literatur ini semakin diperkuat oleh Gillespie & Mitlin (2023: 2) dan Carnegie (2023:1) yang secara eksplisit menyerukan agar dikotomi Utara-Selatan dikritisi secara mendasar, karena kategorisasi tersebut terbukti mengabaikan dinamika sosial yang jauh lebih kompleks, transnasional, dan kontekstual, sehingga secara langsung mengonfirmasi asumsi utama artikel ini bahwa wacana *Global North–Global South* adalah wacana yang tidak netral dan mengandung bias epistemik yang berpihak pada kepentingan negara-negara Utara.

Celah kebaruan ilmiah yang ditawarkan artikel ini terletak pada integrasi kerangka dekonstruktif Derrida dengan perspektif pascakolonial dalam satu analisis terpadu yang secara simultan membongkar ontologi, epistemologi, dan implikasi geopolitik dari dikotomi Utara-Selatan dalam satu kerangka analisis yang koheren, sebuah pendekatan yang belum dilakukan secara sistematis dalam literatur terdahulu yang umumnya hanya mengkritik dikotomi ini secara empiris atau teoritis secara terpisah-pisah (Haug et al., 2021). Dengan menggabungkan analisis dekonstruktif Derrida, pendekatan peta terbalik pascakolonial, dan studi kasus empiris seperti Cina serta negara-negara berkembang di Asia dan Afrika, artikel ini menawarkan kerangka analisis yang lebih holistik, refleksif, dan pluralistik untuk memahami pembangunan sebagai proses multidimensional yang ditentukan oleh faktor historis, sosiologis, dan transnasional, melampaui pendekatan-pendekatan sebelumnya yang cenderung parsial dan belum mengintegrasikan perspektif dekolonial dengan dekonstruksi filosofis secara bersamaan (Gillespie & Mitlin, 2023).

Pembahasan dalam artikel ini dibagi ke dalam tiga *sections*. *Pertama*, pembahasan difokuskan pada kritik ontologis terhadap *Global North* dan *Global South*. *Kedua*, pembahasan dititikberatkan pada kelemahan dari klasifikasi tersebut. *Ketiga*, perspektif pascakolonial dan kritik terhadap generalisasi studi Utara-Selatan.

2. Metode Penelitian

Metode riset yang penulis gunakan adalah metode kualitatif studi pustaka yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena *North-South studies* melalui bacaan yang digunakan untuk memahami *Global North-South* dalam studi pembangunan dan hubungan internasional. Penelitian ini berfokus pada lokasi studi terdahulu terkait *Global North* dan *Global South* dan dilaksanakan dalam rentang waktu 2025–2026 melalui penelusuran sumber akademik yang relevan. Kategorisasi literatur dibagi menjadi literatur pascakolonial dan literatur pembangunan kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji literatur terkait studi pascakolonial dan pembangunan kontemporer. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi, kategorisasi berdasarkan subjek literatur (pascakolonial, pembangunan kontemporer), dan interpretasi untuk mengidentifikasi pola dan bias dalam wacana Utara–Selatan, serta dianalisis menggunakan pendekatan dekonstruktif.

Penelitian ini juga memperhatikan etika akademik dengan memastikan penggunaan sumber yang kredibel, pencantuman sitasi yang tepat, serta menjaga objektivitas dalam proses analisis melalui hasil sintesis penulis berdasarkan analisis kritis literatur-literatur yang digunakan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- **Kritik Ontologis terhadap *Global North* dan *Global South***

Pembahasan berkaitan dengan kritik terhadap ontologi dibalik wacana kajian Utara-Selatan, serta memberikan kritik dari pemikiran pascakolonial untuk mendobrak *status quo* yang dibangun oleh kajian tersebut. Untuk mendekonstruksi dan memberikan kritik terhadap wacana kajian Utara-Selatan diperlukan evaluasi ontologis dan historis terhadap wacana tersebut. Asal-usul wacana *Global North* dan *Global South* muncul dari warisan kolonialisme yang dikembangkan lebih lanjut oleh Brand Report pada tahun 1980an di zaman perang dingin.

Menurut McEwan (2009:12), narasi *Global North* dan *Global South* hadir dikarenakan negara-negara Utara membangun wacana untuk membentuk persepsi global sehingga negara Utara dapat mendapatkan kepentingan politik dan mengeksploitasi negara-negara Selatan. Kajian Utara-Selatan dijadikan *status quo* dalam studi pembangunan dan membuat terwujudnya dikotomi yang bersifat hierarkis secara epistemik. Oleh karenanya, para peneliti dan akademisi pembangunan cenderung menggunakan epistemologi dan metodologi yang menghasilkan riset penelitian dengan hasil bahwa negara Selatan selalu tidak diunggulkan dan didominasi oleh pengaruh dan keinginan negara. Oleh karenanya, para peneliti dan akademisi pembangunan cenderung menggunakan epistemologi dan metodologi yang menghasilkan riset penelitian dengan hasil bahwa negara Selatan selalu tidak diunggulkan dan didominasi oleh pengaruh dan keinginan negara Utara.

Dominasi epistemik tersebut tidak hanya berhenti pada pembentukan wacana di masa lalu, tetapi juga terus direproduksi dalam praktik keilmuan kontemporer. Kerangka berpikir pembangunan masih banyak berangkat dari asumsi linearitas, di mana negara-negara Selatan diposisikan sebagai entitas yang “belum mencapai” tahap kemajuan negara-negara Utara. Padahal, konsep “kemajuan” itu sendiri merupakan konstruksi yang lahir dari pengalaman historis negara-negara Utara (Connell 2007:7). Hal ini menunjukkan bahwa ontologi *Global North–Global South* bukanlah realitas objektif yang netral, melainkan hasil produksi pengetahuan yang menetapkan standar tunggal pembangunan global. Akibatnya, negara-negara Selatan tidak hanya dikategorikan sebagai tertinggal secara struktural, tetapi juga diposisikan secara epistemik sebagai objek yang harus mengikuti jalur perkembangan yang telah ditentukan oleh negara-negara Utara.

Dari perspektif ontologis yang lebih mendalam, dikotomi ini juga mengandung kontradiksi internal karena mengabaikan sifat relasional antara Utara dan Selatan itu sendiri. Perkembangan negara-negara Utara tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan negara-negara Selatan, baik melalui eksploitasi sumber daya, tenaga kerja, maupun relasi ekonomi global yang saling bergantung (Wallerstein 2011:124). Dengan demikian, keberadaan Utara sebagai entitas yang dianggap maju justru terbentuk melalui relasinya dengan Selatan sebagai entitas yang dimarjinalkan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kategori tersebut tidak dapat dipahami sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari satu sistem global yang saling membentuk. Oleh karena itu, penggunaan dikotomi ini secara ontologis menjadi problematik karena menciptakan ilusi pemisahan yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas historis dan struktur yang membangun persepsi tersebut. Dengan demikian, kritik ontologis ini menegaskan bahwa dikotomi *Global North–Global South* bukan hanya bermasalah secara konseptual, tetapi juga gagal merepresentasikan realitas global yang bersifat dinamis dan kompleks.

- **Kelemahan dari Klasifikasi *Global North* dan *Global South***

Klasifikasi *Global North* dan *Global South* tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap kecenderungannya yang terlalu menyederhanakan realitas global. Klasifikasi ini sering

digunakan sebagai kerangka dasar dalam memahami ketimpangan pembangunan, namun dalam praktiknya justru menghasilkan generalisasi yang problematik. Pengelompokan negara ke dalam kategori Utara dan Selatan cenderung mengabaikan keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan politik di dalam masing-masing negara, sebagaimana ditunjukkan oleh Patrick dan Huggins (2023:12), bahwa istilah *Global South kerap* digunakan sebagai label kolektif yang menghapus kompleksitas internal. Dalam konteks ini, Haug (2021:4) menegaskan bahwa kategori tersebut tidak mampu menjelaskan dinamika politik global secara memadai. Klasifikasi ini lebih merepresentasikan penyederhanaan analitis daripada refleksi yang akurat terhadap realitas global.

Adapun kelemahan dari klasifikasi *Global North* dan *Global South* tersebut mencakup (1) pengabaian dinamika empiris; (2) adanya bias epistemik yang melekat; (3) kegagalan menangkap relasi struktural dan interdependensi antar negara-negara dalam sistem global; (4) ketidakmampuan menangkap variasi internal dalam masing-masing kategori; dan (5) pengabaian dinamika perubahan dalam sistem global yang bersifat tidak linear, sebagaimana yang akan dibahas berikut ini.

Kelemahan tersebut semakin terlihat ketika dikaitkan dengan dinamika empiris yang terus berkembang. Pembagian Utara–Selatan bersifat statis dan tidak mampu mengakomodasi perubahan posisi negara dalam sistem global. Perkembangan negara seperti Cina menunjukkan bahwa batas antara Utara dan Selatan menjadi semakin kabur, di mana negara yang secara tradisional dikategorikan sebagai Selatan mampu menunjukkan performa pembangunan yang signifikan (Haug et al. 2021: 5). Selain itu, kajian oleh Ito (2024:10) menunjukkan bahwa dinamika sosial dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipahami hanya melalui kategori geografis tersebut. Hal ini menegaskan bahwa klasifikasi *Global North–Global South* tidak memiliki fleksibilitas untuk menjelaskan perubahan global yang bersifat non-linear dan kontekstual.

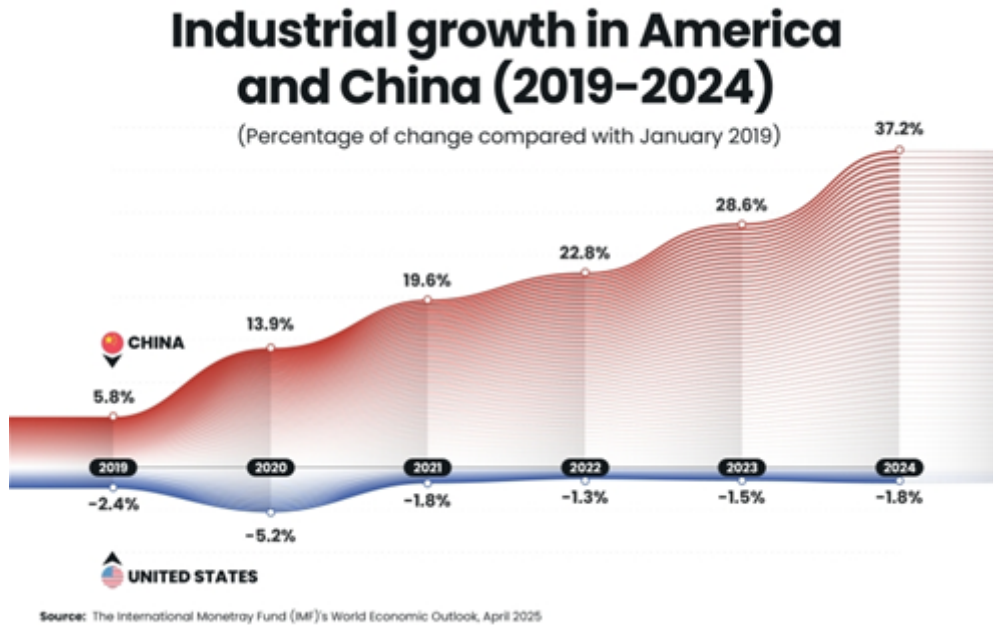
Kelemahan klasifikasi ini juga terletak pada bias epistemik yang melekat di dalamnya. Kategori *Global North* dan *Global South* tidak berdiri secara netral, melainkan dibentuk oleh dominasi pengetahuan dari negara-negara Utara yang menetapkan standar pembangunan global. Connell (2007:9) menunjukkan bahwa produksi pengetahuan global masih didominasi oleh perspektif Utara, sementara Santos (2018:12) menekankan bahwa konsep *Global South* berkaitan erat dengan sejarah penindasan dan marginalisasi. Dalam konteks ini, klasifikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai mekanisme yang mereproduksi relasi kuasa global dalam studi pembangunan.

Pendekatan biner dalam klasifikasi ini juga gagal menangkap relasi struktural dan interdependensi antara negara-negara dalam sistem global. Pembagian antara Utara dan Selatan menciptakan kesan bahwa keduanya merupakan entitas yang terpisah, padahal dalam kenyataannya saling terkait dalam satu sistem ekonomi-politik global. Wallerstein (2011:41) menunjukkan bahwa hubungan antara *core*, *semi-periphery*, dan *periphery* bersifat saling bergantung. Hal ini dipertegas oleh McEwan (2009:11) bahwa pembangunan di negara-negara Utara tidak dapat dilepaskan dari keterlibatannya dengan negara-negara Selatan. Oleh karena itu, klasifikasi *Global North–Global South* menjadi problematik karena gagal merepresentasikan keterkaitan struktural yang justru menjadi fondasi dari sistem global itu sendiri. Dengan demikian, kelemahan-kelemahan tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi *Global North–Global South* tidak hanya terbatas secara konseptual, tetapi juga tidak memadai secara empiris dalam menjelaskan realitas global yang kompleks dan dinamis. Keterkaitan struktural antara negara Utara dan Selatan dapat dipahami secara konkret melalui relasi rantai pasokan global, di mana negara-negara Selatan kerap berperan sebagai pemasok bahan mentah bagi industri negara-negara Utara, sementara nilai tambah ekonomi dari pengolahan komoditas tersebut justru dinikmati oleh negara-negara Utara (Wallerstein 2011:41). Sebagai

contoh, Amerika Serikat secara historis mengekstraksi komoditas strategis seperti tembaga dari Chile, minyak dari Venezuela, dan hasil pertanian dari berbagai negara Amerika Latin, yang kemudian diolah menjadi produk bernilai tinggi oleh industri manufaktur negara Utara dan dijual kembali ke pasar global dengan harga jauh lebih mahal daripada harga bahan mentahnya, sebuah mekanisme yang oleh McEwan (2009:18) disebut sebagai manifestasi nyata dari relasi kolonial yang bertahan dalam sistem pembangunan kontemporer. Ketergantungan asimetris semacam ini membuktikan bahwa klasifikasi *Global North–Global South* yang seolah memisahkan keduanya sebagai entitas independen justru menyembunyikan relasi interdependensi struktural yang fundamental, di mana kemajuan negara Utara pada dasarnya dibangun di atas ketergantungan terhadap sumber daya dan komoditas negara Selatan (Odeh 2010: 11).

Ontologi dan epistemologi dari kajian Utara-Selatan semakin terbukti tidak konsisten dan terlalu digeneralisir, terutama dalam penggunaan istilah *Global South*. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Patrick & Huggins (2023:12) yang menunjukkan bahwa istilah *Global South* melupakan keragaman politik, ekonomi, dan budaya negara-negara yang diklasifikasikan secara geografis ada di Selatan peta dunia. Bukti dari kegagalan klasifikasi “negara Selatan” dibuktikan dari negara Cina. Cina yang secara geografis diklasifikasikan oleh Brand Report (1980) ada di Selatan pada kenyataannya memiliki kemampuan ekonomi, politik, dan kesejahteraan sosial.

Relevansi Brandt Report (1980) sebagai referensi historis tidak dapat diabaikan karena dokumen ini merupakan titik awal yang secara eksplisit mempopulerkan binaritas *Global North–Global South* dengan menggunakan GDP per kapita sebagai indikator utama pemisahan negara maju dan berkembang, dan pengaruh konseptualnya terbukti bertahan hingga abad ke-21 sebagaimana ditunjukkan oleh lonjakan penggunaan istilah *Global South* dalam literatur akademik dari hanya 1 kali pada tahun 1994 menjadi lebih dari 1.600 kali pada tahun 2020 (Carnegie 2023:1). Data kontemporer dari laporan UNDP Human Development Report (2025) memperkuat kesahihan argumen tersebut dengan membuktikan bahwa negara-negara *Global North* seperti Islandia, Swiss, dan Norwegia masih mendominasi peringkat tertinggi Indeks Pembangunan Manusia yang mengukur pendapatan per kapita, harapan hidup, dan pendidikan secara bersamaan, sementara separuh negara-negara termiskin di dunia, yang sebagian besar berada di *Global South*, masih tertinggal jauh di bawah kondisi pra-pandemi mereka (UNDP 2025:1). Dalam aspek politik, laporan Freedom House (2025) yang mengevaluasi hak-hak politik dan kebebasan sipil di 195 negara secara konsisten menempatkan negara-negara *Global North* seperti Finlandia, Swedia, dan Norwegia pada skor kebebasan tertinggi, sementara mayoritas negara *Global South* masih dikategorikan sebagai *partly free* atau *not free*, yang membuktikan bahwa kesenjangan pembangunan politik yang diidentifikasi oleh Brandt Report masih relevan secara empiris meskipun telah memasuki abad ke-21 (Freedom House 2025:1). Dengan demikian, penggunaan GDP per kapita secara tunggal oleh Brandt Report sebagai acuan klasifikasi tetap bermasalah secara metodologis karena gagal menangkap ketimpangan distribusi pendapatan di dalam negeri maupun perubahan struktural negara-negara seperti Cina, sehingga indikator yang lebih multidimensional dan kontekstual seperti HDI justru dibutuhkan untuk memahami dinamika global yang terus berubah secara tidak linear (Lees 2020: 5).



Contoh dari relevansi premis tersebut terletak di negara Amerika Serikat yang dibandingkan dengan negara Selatan, Tiongkok, hal itu dapat dilihat pada grafik perkembangan industri antara Amerika dan Cina pada **Gambar 1** berikut ini:

Gambar 1. Perkembangan Industri Cina
Sumber: Al Majalla (2024:2)

Secara komparatif, Cina yang dikategorisasikan sebagai negara Selatan mengalahkan perkembangan industri Amerika Serikat yang dianggap negara Utara (Al Majalla 2024). Salah satu kategorisasi dari Brandt untuk mengklasifikasikan negara Utara dengan ekonomi yang lebih maju daripada negara Selatan berhasil dipatahkan dengan bukti tersebut. Dari aspek politik dan sosial, Patrick & Huggins (2023:27) juga menyatakan Cina mempunyai sistem yang lebih baik karena menyediakan regulasi seperti *social safety net* dan *one party one state* yang mencegah adanya konflik politik domestik dan memberikan jaminan sosial yang tinggi terhadap seluruh rakyatnya. Argumentasi tersebut dibuktikan oleh Bell (2021:21) yang menyatakan bahwa sistem meritokrasi yang diimplementasikan oleh Cina merupakan salah satu dongkrak ekonomi-politik dan memajukan Cina secara pesat. Cina dengan sistem meritokrasinya yang disandingkan dengan kebijakan *one party one rule* membuat pemimpin-pemimpin lokal dan pusatnya dipimpin oleh orang yang tepat dan berdasarkan prestasi. Bell memberikan studi kasus dan bukti bahwa premis politik *elevating the worthy* (menaikkan yang pantas) merupakan cara yang efektif untuk menentukan siapa yang pantas memimpin negara dan kota. Pemikiran politik ini ironisnya datang dari pemikiran filsuf negara Selatan, yaitu Confucius yang menyatakan bahwa “kepemimpinan harus dipegang oleh orang dengan kemampuan di atas rata-rata dan dipercayai oleh rakyat berdasarkan prestasinya, bukan hartanya.” Cina juga menerapkan *guardianship discourse*, pemikiran dari negara Selatan, yaitu Cina yang memberikan gagasan bahwa status dan kredibilitas politikus yang ada dalam suatu negara akan secara otomatis didapatkan jikalau para politikus tersebut memikirkan kebutuhan rakyat, memberikan konsiderasi yang besar terhadap kebutuhan rakyat pada tahap pembuatan keputusan dan formulasi kebijakan, dan memberikan kebijakan terbaik bukan untuk partai atau dirinya sendiri, tetapi untuk masyarakat dan komunitas dimana dia memimpin. Hal ini

berbeda dengan sistem demokrasi yang digaungkan oleh negara-negara Utara yang menegaskan bahwa perkembangan sistem demokrasi negara-negara Utara menghasilkan *democratic malaise*, frasa ini menekankan bahwa demokrasi di negara-negara Utara hadir karena globalisasi yang menghadirkan kapitalisasi terhadap barang, jasa, dan modal. Ketiga yang telah terkapitalisasi ini menghasilkan sistem pemilihan yang tidak proporsional, yang terjadi adalah proses pemilihan politik dengan sistem *one dollar one vote*, bukan *one man one vote*.

Kelemahan dari klasifikasi *Global North* dan *Global South* juga terlihat dari ketidakmampuannya menangkap variasi internal dalam masing-masing kategori. Klasifikasi ini cenderung memperlakukan negara sebagai unit yang homogen, padahal dalam praktiknya terdapat ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan di dalam setiap negara, baik yang dikategorikan sebagai Utara maupun Selatan, sebagaimana ditunjukkan dalam studi mengenai kemiskinan dan ketimpangan, negara-negara yang secara geografis berada di Utara tetap menghadapi persoalan struktural seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan, sementara beberapa negara di Selatan justru menunjukkan capaian pembangunan yang signifikan (Palma 2024:34). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kategori biner tersebut tidak hanya menyederhanakan realitas, tetapi juga berpotensi menyesatkan dalam memahami distribusi kesejahteraan dan dinamika pembangunan yang sebenarnya terjadi di tingkat domestik.

Penting untuk diakui bahwa argumen variasi internal dalam klasifikasi *Global North–Global South* tidak hanya berlaku bagi negara-negara Utara yang menghadapi kemiskinan struktural, tetapi juga harus disertai pengakuan bahwa dinamika pembangunan dan kesejahteraan di dalam negara-negara *Global South* sendiri juga tidak berada dalam kondisi yang merata, bahkan beberapa negara yang dikategorikan sebagai kekuatan *emerging Global South* justru menghadapi ketimpangan sosial-ekonomi yang sangat parah di tingkat domestiknya (Haug dkk. 2021:4). Hal ini terbukti secara konkrit dalam kelompok negara-negara BRICS, di mana Afrika Selatan tercatat sebagai negara paling tidak merata di dunia berdasarkan basis data kemiskinan global World Bank yang mencakup 164 negara, dengan koefisien Gini sebesar 0,63 dan 10% penduduk terkayanya menguasai lebih dari 80% total kekayaan nasional akibat warisan struktural kolonialisme dan segregasi rasial yang belum terselesaikan (World Bank 2022:1). Ketimpangan serupa juga terdokumentasi di negara-negara BRICS lainnya, di mana data Oxfam (2013) menunjukkan bahwa di India, Afrika Selatan, dan Cina, penduduk pedesaan semakin tertinggal dari penduduk perkotaan, dengan 50,3% populasi pedesaan Cina tidak memiliki akses terhadap layanan publik seperti asuransi kesehatan dan pendidikan tinggi, sementara Brasil mencatat koefisien Gini sebesar 51,6 yang hampir dua kali lipat rata-rata negara-negara OECD, membuktikan bahwa kemajuan ekonomi makro negara-negara Selatan tidak serta-merta mencerminkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya (Oxfam 2013:1). Data *World Inequality Database* (WID 2024) lebih lanjut mengonfirmasi bahwa negara-negara *Global South* secara kolektif menyumbang besarnya ketimpangan global, dengan 10% penduduk terkaya Afrika Selatan menguasai 65% pendapatan nasional dan kawasan Sub-Saharan Afrika yang didominasi negara-negara *Global South* mewakili hanya 16% populasi dunia namun menyumbang 67% dari total populasi yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, sehingga klasifikasi biner Utara-Selatan terbukti tidak hanya gagal menjelaskan disparitas antar-kategori, tetapi juga mengaburkan realitas ketimpangan struktural yang parah di dalam kategori *Global South* itu sendiri (World Bank 2024:1).

Generalisasi dalam klasifikasi ini juga mengabaikan dinamika perubahan dalam sistem global yang bersifat tidak linear. Perkembangan ekonomi-politik global menunjukkan bahwa posisi suatu negara dalam struktur internasional tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah seiring dengan transformasi kebijakan, kapasitas institusional, dan integrasi dalam ekonomi global. Dalam konteks ini, studi mengenai

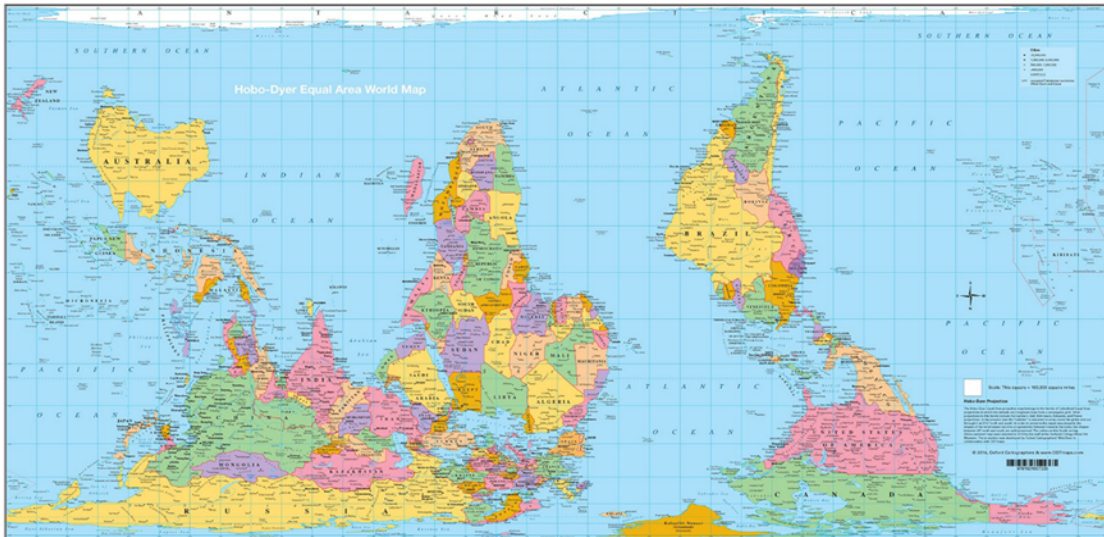
perkembangan Cina dan transformasi negara-negara lain di Asia menunjukkan bahwa negara yang sebelumnya dikategorikan sebagai Selatan dapat mengalami akselerasi pembangunan yang signifikan dan bahkan menyaingi negara-negara Utara (Haug dkk. 2021:11). Dengan demikian, klasifikasi *Global North–Global South* menjadi semakin tidak relevan karena gagal menangkap mobilitas dan fluiditas posisi negara dalam tatanan global. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih kontekstual dan dinamis diperlukan untuk memahami perkembangan global secara lebih akurat, dibandingkan dengan tetap mempertahankan kategorisasi biner yang bersifat statis.

Hal ini memberikan makna bahwa kekuasaan tidak diatur oleh hak pemilihan suara, tetapi diatur oleh siapa yang memiliki modal dan menguasai pasar. Hal ini menghasilkan *political inequality* di negara-negara Utara. Sementara itu, Cina ironisnya menerapkan sistem demokrasi yang lebih baik yang digaungkan oleh negara-negara Utara. Hal ini terjadi karena sistem kaderisasi dan meritokrasi *Chinese Communist Party* (CCP) dan sistem politik domestik Cina. Dalam kepemimpinan tertinggi Cina seperti presiden dan pemimpin provinsi, implementasi meritokrasi ditekankan dan diuji terhadap para politikus tersebut dari rasionalisasi kader-kader CCP yang memerintah dari berbagai faktor seperti kebijaksanaan pembangunan kebijakan untuk pembangunan masyarakat, mengimplementasikan model kepemimpinan anti-korupsi, dan ketegasan terhadap pelanggaran dan aksi kriminal. Bell (2021:21) mengutip pernyataan dari perdana menteri Cina (PM Li) yang menjelaskan bahwa prosedur kaderisasi dan kajian politik CCP dimulai dari (1) nominasi kader, dimana kader-kader diberikan nominasi yang berdasarkan prestasi pada saat mereka menjabat dalam kepemimpinan lokal; diikuti dengan (2) ujian dan eksaminasi lanjutan, ujian dan pemeriksaan terhadap latar belakang calon pemimpin tersebut disertai pengujian terkait pengetahuan tentang *good governance* maupun ideologi politik yang diusung oleh Cina. Di dalam fase ini hanya lima orang saja yang dapat melanjutkan ke fase berikutnya, yaitu fase *voting*, fase dimana dua sampai lima orang yang terpilih dan direkomendasikan untuk lolos ke fase berikutnya. Pemilihan ini dimulai oleh Sekretaris Jenderal *Chinese Communist Party* dan orang-orang dari *steering committee* lainnya di dalam partai tersebut, yaitu para menteri dan presiden yang memimpin Cina yang totalnya semua adalah 12 orang. Fase terakhir (3) adalah untuk memutuskan siapa yang akan maju untuk menjadi pemimpin provinsi, akan dibutuhkan minimal delapan suara yang melegitimasi kekuasaannya sebagai pemimpin.

Aspek ekonomi yang diunggulkan oleh kajian Utara-Selatan oleh Brandt Report juga dipecahkan bukan dari Cina saja, melainkan dari hasil perbandingan struktural ekonomi antara negara Utara dan Selatan yang secara historis dikonstruksikan oleh *status quo* negara barat. Pada dasarnya, ada juga negara-negara Utara yang bahkan secara ekonomi lebih rendah dibandingkan negara Selatan. Hal itu dapat dicontohkan oleh negara SPIN (Spanyol dan Portugal) yang terletak secara geografis di Utara dan memiliki sistem ekonomi dan produksi yang maju. Negara SPIN walaupun memenuhi kategorisasi sebagai negara Utara melalui kedua hal tersebut pada nyatanya mengalami resiko kemiskinan dengan angka 20.4% (Palma 2024: 34), sementara negara-negara Asia yang dikategorisasikan sebagai negara Selatan memiliki angka resiko kemiskinan dibawah 10% (UNU 2022). Ini kembali mengindikasikan bahwa generalisasi dari wacana Utara-Selatan gagal untuk membuktikan secara lebih dalam dari aspek kategorisasi yang dibuat oleh wacana itu sendiri.

- **Perspektif Pascakolonial & Kritik terhadap Generalisasi Studi *North-South***

Kajian Utara-Selatan juga dapat dikritik oleh perspektif pascakolonial terhadap pembangunan internasional. McEwan (2009:18) berargumentasi bahwa pembangunan internasional sering dihubungkan dengan relasi kolonial dan negara-negara yang berjaya sampai masa kini dari zaman kolonialisme. Dari karya *Postcolonial and Development*, McEwan (2009:18) berargumentasi bahwa studi pembangunan mengabaikan perspektif dari negara Selatan dan mereka harus dipaksa menggunakan model pembangunan yang dibangun hanya dari negara-negara Utara yang telah mendominasi studi pembangunan. Oleh karena itu, studi pembangunan kembali lagi hanya menjadi instrumen hegemoni pengetahuan dan doktrin utama dalam inisiasi negara Selatan untuk melaksanakan pembangunan politik dalam negaranya. Bukti yang diberikan oleh McEwan (2009:18) adalah bagaimana Amerika Serikat yang memaksakan negara-negara Selatan untuk mengimplementasikan *Washington Consensus* yang termanifestasi sampai zaman sekarang dengan bagaimana banyak negara menggunakan mata uang dan sistem ekonomi dari Amerika Serikat yang merupakan negara Utara. Perspektif pascakolonial memberikan alternatif terhadap wacana Utara-Selatan yang didasarkan pada dua hal, yaitu: memberikan visualisasi peta dunia *upside-down* dan dekonstruksi biner. Peta dunia yang ditawarkan pascakolonial dapat dilihat pada **Gambar 2** berikut ini:



Gambar 2. Peta Terbalik yang Ditawarkan Pascakolonialisme
Sumber: Zoltan Ginelli (2019:1)

Peta ini mematahkan argumen dasar dari kajian Utara-Selatan yang menyatakan bahwa negara Utara yang secara geografis terletak di Utara memiliki keunggulan geografis, ekonomi, dan politik yang jauh lebih baik daripada negara Selatan (Ginelli 2019:1). Jikalau peta dunia dibalik seperti pemikiran pascakolonialisme, maka negara yang dikategorisasikan Selatan menurut Brand Report sekarang secara geografis terletak di Utara. Oleh karenanya, signifikansi dari kajian Utara-Selatan yang dibuat oleh Brand Report dapat langsung dipatahkan dengan narasi pascakolonialisme yang membuktikan pembalikan peta dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel geografis yang diunggulkan oleh kajian Utara-Selatan.

Selain itu, narasi pascakolonial memberikan prinsip dekonstruksi yang dikembangkan dari Derrida. Menurut Derrida (1944:213), oposisi biner yang diwujudkan dari kolonialisme dan penerapan *status quo* terhadap negara mana yang lebih kuat

adalah kajian yang maknanya tidak netral dan memihak pada yang membangun wacana tersebut. Konteks peta terbalik tersebut Jika disandingkan oleh gagasan Derrida memberikan penjelasan bahwa kajian Utara-Selatan adalah kajian yang sifatnya hanyalah logocentrisme. Artinya, Brand Report hanya menempatkan negara-negara Utara sebagai negara adidaya yang menjadi pusat yang memiliki kriteria negara progresif-rasional. Sementara itu, negara Selatan cenderung diberikan stereotip sebagai negara pinggiran yang termarginalisasi dengan ciri-ciri pasif, tradisional, dan tertinggal. Menurut Derrida (1994:213), ini membuat kajian politik pembangunan dengan pemikiran seperti ini hanya dapat menunjukkan bahwa hierarki biner yang sifatnya terlalu dikotomis dan kajian kritis terhadap hal tersebut masih sangat terbatas. Derrida juga menambahkan bahwa kajian binaritas Utara-Selatan dapat menimbulkan ketidakmurnian kategorisasi makna. Padahal, negara-negara Utara juga memiliki jejak historis dan dapat berkembang karena ketergantungan terhadap komoditas, dan pekerja murah dari negara Selatan.

Perspektif pascakolonial tidak hanya mengkritik dominasi wacana pembangunan, tetapi juga membongkar struktur makna yang selama ini dianggap stabil dalam dikotomi *Global North–Global South*. Dalam kerangka dekonstruksi, oposisi biner tersebut tidak pernah benar-benar netral, melainkan selalu mengandung hierarki tersembunyi yang menempatkan Utara sebagai pusat rasionalitas dan Selatan sebagai perifer yang terdefiniskan melalui kekurangannya (Derrida 1944:214). Dengan demikian, makna “kemajuan” dan “keterbelakangan” tidak berdiri sebagai kategori objektif, tetapi sebagai hasil dari permainan diferensial makna yang terus diproduksi dan direproduksi dalam wacana pembangunan global. Perspektif ini mengindikasikan bahwa apa yang selama ini dipahami sebagai realitas pembangunan sesungguhnya merupakan konstruksi diskursif yang bersifat kontingen, tidak stabil, dan selalu terbuka untuk dipertanyakan kembali.

Pendekatan pascakolonial juga mengungkap bahwa keberadaan *Global North* dan *Global South* tidak dapat dipahami sebagai entitas yang terpisah secara esensial, melainkan saling mengandaikan satu sama lain dalam relasi yang bersifat diferensial dan relasional. Dalam logika dekonstruksi, keberadaan Utara hanya memperoleh maknanya melalui keberadaan Selatan, begitu pula sebaliknya, sehingga batas di antara keduanya menjadi kabur dan tidak pernah sepenuhnya tetap. Hal ini membuka ruang untuk melihat bahwa praktik-praktik pembangunan alternatif yang muncul dari negara-negara Selatan bukan sekadar bentuk resistensi, tetapi juga merupakan upaya untuk meredefinisi makna pembangunan itu sendiri di luar kerangka logocentris yang telah mapan (Gillespie & Mitlin 2023). Dengan demikian, perspektif pascakolonial tidak hanya meruntuhkan generalisasi dalam studi Utara–Selatan, tetapi juga menantang fondasi ontologis dari kategori tersebut dengan menunjukkan bahwa makna, identitas, dan posisi dalam sistem global selalu berada dalam proses yang tidak pernah final.

Sementara itu, negara-negara Selatan juga menyimpan jejak negara-negara Utara dari pembentukan institusi dan pengikutsertaan negara Selatan dalam meningkatkan institusi dari negara-negara Utara. Jika disandingkan dengan argumentasi Derrida, kajian klasifikasi Utara-Selatan gagal menjelaskan secara kritis aspek-aspek mendalam yang ada dan mempengaruhi kajian Utara-Selatan. Selain itu, dalam perspektif pascakolonial dari Derrida, teridentifikasi bahwa kajian negara yang dibagi dalam kategorisasi Utara atau Selatan saja gagal mengidentifikasi realitas lebih dalam. Misalnya studi dan kajian terhadap negara transisi atau berkembang, negara-negara ini tidak dapat dijelaskan model pembangunan politik dan ekonominya hanya dengan kajian Utara dan Selatan saja. Bahkan kemunduran dan ketimpangan dalam negara-negara Utara tidak bisa diidentifikasi dan kemajuan yang dijalankan oleh negara-negara Selatan gagal dijelaskan oleh kajian Utara-Selatan saja. Argumentasi Derrida dapat dibuktikan

dengan studi Gillespie dan Mitlin (2023) yang memberikan bukti bahwa organisasi masyarakat sipil urban dari negara-negara Selatan dapat mengubah narasi yang membuat warga negaranya lebih menghargai negaranya tanpa harus membandingkan nasionalismenya dengan negara-negara Utara. Studi ini menunjukkan bahwa elit lokal politik dalam negara-negara Selatan, yaitu Kenya, Uganda, dan Ethiopia secara aktif dapat berkolaborasi dengan perusahaan dari negara Utara dan negara Selatan, seperti Cina dan India, dalam membuat proyek LAPPSET Corridor yang memberikan lahan komunitas pastoral dan lapangan edukasi untuk mengedukasi rakyat lokal.

Kajian Afua Twum-Danso Imoh (2024) juga memberikan bukti bahwa perspektif anak kecil dalam belajar dan memiliki kesejahteraan dapat ditopang bukan hanya dengan mengikuti sistem edukasi dan ekonomi dari negara-negara Utara, melainkan membangun sistem ekonomi, politik, dan pendidikan yang cocok sebagai alternatif pengembangan masyarakat dalam negeri tanpa mengikuti *status quo* dari narasi kajian Utara-Selatan. Studi Twum-Danso (2024) menunjukkan bahwa keragaman internal yang dikaji secara sosiologis dapat memecahkan kajian Utara-Selatan. Studi kasus dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan struktural di Appalachia-AS dan kemajuan di Kerala-India dapat melampaui kemajuan di negara-negara Utara. Hal ini juga dibuktikan oleh kajian Twum Danso (2024:20) di Rwanda dan Kerala yang menunjukkan bahwa negara-negara Utara juga dapat bergantung pada negara Selatan dan dibuktikan oleh bagaimana negara-negara Utara dalam konteks penelitian tersebut bergantung pada 75% mineral hijau dari Afrika dan tenaga kerja dari migran negara-negara Selatan, yaitu Rwanda. Dengan merujuk pada studi kasus tersebut, maka studi pembangunan dan hubungan internasional perlu bergerak menuju pendekatan yang lebih kontekstual, reflektif, dan inklusif, dengan mempertimbangkan faktor historis, sosiologis, dan transnasional

4. Kesimpulan

Bias *Global North–Global South* dalam studi pembangunan dan hubungan internasional tidak lagi memadai sebagai kerangka analisis utama untuk memahami dinamika global kontemporer. Kategorisasi tersebut bersifat reduksionis karena menyederhanakan realitas sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks ke dalam pembagian geografis yang kaku. Secara ontologis dan historis, dikotomi ini terbukti berakar pada warisan kolonialisme dan berkembang menjadi instrumen epistemik yang mereproduksi relasi kuasa global, dimana perspektif dari negara-negara Utara lebih dominan dibandingkan perspektif dari negara-negara Selatan.

Secara empiris, batas antara Utara dan Selatan semakin kabur dan tidak konsisten. Kasus seperti Cina menunjukkan bahwa negara yang secara geografis dikategorikan sebagai Selatan mampu melampaui indikator pembangunan yang selama ini dilekatkan pada Utara. Selain itu, adanya ketimpangan internal di negara-negara Utara dan kemajuan di beberapa negara Selatan menegaskan bahwa klasifikasi yang sifatnya biner tersebut gagal menjelaskan variasi dan dinamika pembangunan. Temuan ini mengindikasikan bahwa realitas global saat ini lebih bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi menjadi oposisi biner yang statis.

Secara teoretis, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan dekonstruktif dan perspektif pascakolonial untuk membongkar asumsi-asumsi dasar dalam wacana *Global North–Global South*. Melalui kerangka ini, penelitian menunjukkan bahwa dikotomi tersebut bukanlah kategori netral, melainkan konstruksi diskursif yang sarat kepentingan dan bias epistemik. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan implikasi bahwa studi pembangunan dan hubungan internasional perlu bergerak menuju pendekatan yang lebih kontekstual, reflektif, dan inklusif, dengan mempertimbangkan faktor historis, sosiologis, dan transnasional. Dengan demikian, pemahaman terhadap pembangunan global tidak lagi didasarkan pada klasifikasi

geografis semata, melainkan pada analisis yang lebih kritis terhadap relasi kekuasaan dan keragaman pengalaman pembangunan di berbagai negara.

Acknowledgement

Terima kasih kepada rekan saya Bintang Corvi Diphda atas masukan yang diberikan dalam proses pembuatan artikel ini.

Conflicts of Interest

Penelitian ini tidak memiliki konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Twum-Danso, I. (2024). *Challenging Global North-Global South Binaries: Implications for Childhood Studies*. 1–15, https://doi.org/10.1007/978-981-4451-96-3_89-1, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Al Majalla. (2025). "US industrial Growth Outpaced by Cina," *Majalla.com*, 1(1):1-3, <https://en.majalla.com/node/325470/infographics/us-industrial-growth-outpaced-Cina>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Bell, K. (2021). "The Role of Government in the Economy: an Islamic Perspective," *Working Paper No. 143*. New York: Institute for New Economic Thinking. <https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/Bell-Paper.pdf>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Carnegie. (2023, August 15). *The Term "Global South" Is Surging: It Should be Retired*, <https://carnegieendowment.org/posts/2023/08/the-term-global-south-is-surging-it-should-be-retired?lang=en>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Connell, R. (2007). *Southern Theory: the Global Dynamics of Knowledge in Social Science*. Kota: Sydney Allen & Unwin, <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781003117346/southern-theory-raewyn-connell>, diakses tanggal 20 Oktober 2025
- Derrida, J. (1944). *of Grammatology*. Baltimore: John Hopkins University Press. <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.124704>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Gillespie, T., & Mitlin, D. (2023). "Global Development and Urban Studies: Tactics for Thinking Beyond the North–South Binary." *Environment and Urbanization*, 35(2):1-20, <https://doi.org/10.1177/09562478231172057>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Ginelli, Z. (2019). *Postcolonial Geography*. <https://zoltanginelli.com/postcolonial-geography/>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Freedom House. (2025). *Freedom in the World 2025: The Uphill Battle to Safeguard Rights*. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2025-02/FITW_World_2025_Feb.2025.pdf, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Haug, S., Braveboy-Wagner, J., & Maihold, G. (2021). "The 'Global South' in the Study of World Politics: Examining a Meta Category," *Third World Quarterly*, 42(9):1–22, <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1948831>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.

- Horner, R. (2020). Towards a new paradigm of global development? Beyond the limits of international development. *Progress in Human Geography*, 44(3), 415–436. <https://doi.org/10.1177/0309132519836158>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Ito, K. (2024). “Global GrassRoots Movements of People with Psychosocial Disabilities in East Asia.” *The International Journal of Disability and Social Justice*, 4(1):99–116, <https://doi.org/10.2307/48774419>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Lees, N. (2020). The Brandt Line after forty years: The more North–South relations change, the more they stay the same? *Review of International Studies*, 47(1), 85–106. <https://doi.org/10.1017/S026021052000039X>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- McEwan, C. (2009). *Postcolonialism and Development*. London: Routledge, <https://doi.org/10.4324/9780203887387>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Naughton, B. (2010). “Cina’s Distinctive System: Can it be a Model for Others? *Journal of Contemporary Cina*, 19(65):437–460, <https://doi.org/10.1080/10670561003666079>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Odeh, L. (2010). “A Comparative Analysis of *Global North* and *Global South* Economies.” *Journal of Sustainable Development in Africa* 12(3):1-15, [https://jsd-africa.com/Jsda/V12No3_Summer2010_A/PDF/A%20Comparative%20Analysis%20of%20Global%20North%20and%20Global%20South%20Economies%20\(Odeh\).pdf](https://jsd-africa.com/Jsda/V12No3_Summer2010_A/PDF/A%20Comparative%20Analysis%20of%20Global%20North%20and%20Global%20South%20Economies%20(Odeh).pdf), diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Palma, P., Barrella, R., João Pedro Gouveia, & José Carlos Romero. (2024). “Comparative Analysis of Energy Poverty Definition and Measurement in Portugal and Spain,” *Utilities Policy*, 90 (1):1-24. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2024.101770>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- PIIE. (2021). *What Is the “Washington Consensus?” Peterson Institute for International Economics*, <https://www.piie.com/realtime-economic-issues-watch/what-washington-consensus>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Roberts, M. (2015). *Cina: Three Models of Development*. <https://mronline.org/wp-content/uploads/2021/01/Cina-paper-july-2015.pdf>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Turner, H., Rogers, B., Kneebone, S., Ramirez, D., French, M., Sawailau, M. J., Volavola, F., Baran, S., Matavesi, K., Newton, O., Luveniyali, M. B., Tela, A., & Vakarewa, I. (2024). An organizing framework to break down Western-centric views of knowledge in North–South research. *Sustainability Science*, 19, 639–655. <https://doi.org/10.1007/s11625-024-01478-6>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Rothstein, R. L. (1990). “Limits and Possibilities of Weak Theory: Interpreting Northsouth.” *Journal of International Affairs*, 44(1):159–181, <https://doi.org/10.2307/24357229>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Santos, B. de S. (2018). *The End of the Cognitive Empire: The Coming of Age of Epistemologies of the South*. California: Duke University Press, <https://read.dukeupress.edu/books/book/2470/The-End-of-the-Cognitive-EmpireThe-Coming-of-Age>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Spencer, J. (1997). “Post-Colonialism and the Political Imagination.” *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, 3(1):1-15, <https://doi.org/10.2307/3034362>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.

- Triuzli, I. (2025). *Strength and Weaknesses of the South-South Learning Exchange*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11259588/pdf/gatesopenres-7-16705.pdf>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- UNDP. (2025). *Human Development Report 2025*. United Nations Development Programme. <https://hdr.undp.org/>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- UNU. (2020). *A Snapshot of Poverty and Inequality in Asia*. <https://www.wider.unu.edu/publication/snapshot-poverty-and-inequality-asia>
- Viterna, J., & Robertson, C. (2015). "New Directions for the Sociology of Development. *Annual Review of Sociology*, 41(1):243–269, <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071913-043426>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Walleri, R. D. (1978). "The Political Economy Literature on North-South Relations: Alternative Approaches and Empirical Evidence," *International Studies Quarterly*, 22(4):151-162, <https://doi.org/10.2307/2600168>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.
- Wallerstein, I. (2011). *The World System Theory*. In University of California Press *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, With a New Prologue*. California: University of California Press, diakses tanggal 20 Oktober 2025.